

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Undang-undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

Rencana Kinerja Tahunan SKPD merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik (Renstra) SKPD yang mencakup periode tahunan. Rencana Kinerja Tahunan SKPD menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah (SKPD) dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategik. Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan.

Berdasarkan pandangan tersebut, Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan tahun 2017 disusun sebagai bahan acuan dan memberikan arah penyelenggaraan pembangunan, khususnya dalam upaya peningkatan ketahanan pangan dan pembangunan perikanan selama satu tahun kedepan, dengan maksud menyatakan gerak langkah seluruh unsur yang terlibat dalam pencapaian tujuan pembangunan pertanian secara umum.

Dalam rangka mencapai visi yang telah ditetapkan, pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mengimplementasikan program dan kegiatan pembangunan ketahanan pangan dan perikanan 2017 dalam Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017 dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah daerah.



## 1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tasikmalaya tahun 2017 disusun atas dasar landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya 2011-2031;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2017;
10. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 37 Tahun 2006 tentang Tatacara Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;



11. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 111 Tahun 2016 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2017.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1. Maksud**

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya dimaksudkan untuk dijadikan sebagai landasan atau pedoman umum bagi pembangunan Sektor Pangan dan Perikanan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian maupun pengawasan secara periodik selama kurun waktu 1 tahun.

#### **1.3.2. Tujuan**

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja adalah untuk mendesign *output* dan *outcome* yang diharapkan dalam 1 tahun. *Output* dan *outcome* tersebut dapat diukur keberhasilannya secara kuantitas, sehingga sasarannya dapat sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Kerja Tahunan Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

*Bab ini menguraikan mengenai Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).*

#### **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN ORGANISASI**

*Bab ini menguraikan mengenai tupoksi, Rencana Strategis, keterkaitan Renstra dengan RPJMD, dan sumber daya manusia.*

#### **BAB III. EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN**

*Bab ini menguraikan evaluasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahun Lalu dan capaian Renstra, analisis kinerja pelayanan SKPD, serta isu-isu strategis.*



#### **BAB IIV. RENCANA KINERJA TAHUN 2017**

*Bab ini menguraikan Program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2017 berdasarkan RKPD 2017 dari berbagai sumberdana.*

#### **BAB V. PENUTUP**

*Bab ini merupakan kata akhir dan kesimpulan penyusunan program/rencana kerja SKPD Tahun 2017.*



## **BAB II**

# **GAMBARAN PELAYANAN ORGANISASI**

### **2.1. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi**

Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah. Tugas pokok dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan adalah:

- a. Perumusan kebijakan bidang ketahanan pangan dan bidang kelautan dan perikanan;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang ketahanan pangan dan bidang kelautan dan perikanan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang ketahanan pangan dan bidang kelautan dan perikanan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang ketahanan pangan dan bidang kelautan dan perikanan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
  - 1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
  - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - 3) Sub Bagian Keuangan dan Aset.
- c. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, membawahkan:
  - 1) Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
  - 2) Seksi Distribusi Pangan.



- d. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, membawahkan :
  - 1) Seksi Konsumsi Pangan;
  - 2) Seksi Keamanan Pangan.
- e. Bidang Perikanan Budidaya, membawahkan :
  - 1) Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya;
  - 2) Seksi Produksi Perikanan Budidaya;
  - 3) Seksi Pemberdayaan Perikanan Budidaya.
- f. Bidang Perikanan Tangkap, membawahkan :
  - 1) Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap;
  - 2) Seksi Produksi Perikanan Tangkap;
  - 3) Seksi Pemberdayaan Nelayan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. Unit Pelaksana Teknis.

## **2.2. Rencana Strategis**

Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem dan kebijakan bidang pangan dan perikanan termasuk pembinaan terhadap stakeholder terkait agar tercapai efektivitas, efisiensi dan produktivitas dalam pelaksanaan pemerintahan.

Rencana strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan pada hakekatnya adalah penjabaran Visi dan Misi Kabupaten. Sasaran kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2017 selanjutnya dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017.

## **2.3. Keterkaitan Renstra dengan RPJMD**

Visi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan mengacu pada visi Pemerintah Kabupaten yaitu “Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Dinamis, dan Berdaya Saing di Bidang Agribisnis Berbasis Pedesaan”. Keterkaitan visi dan misi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dengan visi



Pemerintah Kabupaten terletak pada komponen visi *unggul di bidang agribisnis berbasis pedesaan* yang merupakan bagian dari urusan pangan dan perikanan.

Adapun keterkaitan misi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dengan misi Kabupaten Tasikmalaya terletak pada misi ke dua dari misi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yaitu “Mewujudkan Perekonomian yang Tangguh di Bidang Agribisnis dan Pariwisata” dengan tujuan “Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan dan pemerataan ekonomi berbasis integrasi keunggulan agribisnis, daya saing agribisnis dan pariwisata” dengan sasaran antara lain meningkatkan kesejahteraan petani (termasuk pembudidaya ikan dan nelayan), meningkatkan produksi dan daya saing produksi usaha pertanian dan perikanan, meningkatnya kemampuan SDM Masyarakat pelaku utama dan pelaku usaha, serta meningkatnya ketahanan pangan berbasis potensi pangan lokal.

#### **2.4. Sumber Daya Manusia**

Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tasikmalaya memiliki pegawai 67 orang, terdiri atas kepala dinas yang didukung oleh 13 orang pegawai di Sekretariat, 6 orang pegawai di Bidang Perikanan Budidaya, 6 orang pegawai di Bidang Perikanan Tangkap, 6 orang pegawai di Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, 6 orang pegawai di Bidang Ketersediaan dan Distribusi, 12 orang pegawai di Unit Pelaksana Teknis, dan 16 orang di Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

Pegawai di UPT yang berjumlah 12 orang terdiri atas: 3 orang pegawai di UPT Balai Benih Ikan, 4 orang pegawai di UPT Pangkalan Pendaratan Ikan, dan 5 orang pegawai di UPT Pasar Ikan. Jabatan Fungsional tertentu yang berjumlah 12 orang terdiri atas 12 orang pegawai di Penyuluh Perikanan, dan 4 orang pegawai di Pengawas Perikanan.



## **BAB III**

# **EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN**

### **3.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Urusan Perikanan dan Kelautan**

Urusan Kelautan dan Perikanan merupakan urusan pilihan sebagai urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan keunggulan daerah. Penyelenggaraan urusan kelautan dan perikanan meliputi penyelenggaraan bidang perikanan budidaya, perikanan tangkap, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan serta pemberdayaan dan peningkatan SDM perikanan.

Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam menyelenggarakan urusan pilihan kelautan dan perikanan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang dijabarkan lagi dengan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Unit di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya. Disamping melaksanakan urusan kelautan dan perikanan, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan juga melaksanakan urusan wajib pangan.

Dalam pengembangan perikanan budidaya, masih dihadapkan pada permasalahan implementasi kebijakan tata ruang dan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, terbatasnya prasarana saluran irigasi, terbatasnya ketersediaan dan distribusi induk dan benih unggul, kesiapan dalam menanggulangi hama dan penyakit, penyediaan fasilitas kolam dan air yang baik serta permasalahan bahan baku pakan dan kestabilan harga, serta tingginya harga pakan. Rendahnya produktifitas perikanan budidaya juga disebabkan karena struktur pelaku usaha perikanan budidaya adalah skala kecil/tradisional ( $\pm 80\%$ ), dengan keterbatasan aspek permodalan, jaringan teknologi dan pasar. Disamping itu serangan hama dan penyakit ikan/udang, serta adanya pencemaran yang mempengaruhi kualitas lingkungan perikanan budidaya.





Bidang kelautan memiliki permasalahan yang kompleks karena keterkaitannya dengan banyak sektor dan juga sensitif terhadap interaksi terutama dengan aspek lingkungan. Terdapat berbagai isu pengelolaan perikanan laut di Indonesia yang berpotensi mengancam kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan, keberlanjutan mata pencaharian masyarakat di bidang perikanan, ketahanan pangan, dan pertumbuhan ekonomi yang bersumber dari pemanfaatan sumber daya perikanan.

Permasalahan lain yang dihadapi terkait dengan masih rendahnya produktivitas dan daya saing usaha kelautan dan perikanan yang disebabkan oleh struktur armada penangkapan ikan yang masih didominasi oleh kapal berukuran kecil, belum optimalnya integrasi system produksi di hulu dan hilir, serta masih terbatasnya penyediaan sarana dan prasarana secara memadai. Disamping itu, aspek sangat mendasar yang mempengaruhi lemahnya daya saing dan produktivitas adalah kualitas SDM dan kelembagaannya.

Pada Tahun 2016, Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan dalam menyelenggarakan urusan pilihan perikanan dan kelautan merujuk pada kapasitas fungsi dinas dalam mencapai sasaran indikator kinerja sesuai dengan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 berdasarkan tiga program prioritas yaitu 1) Pengembangan Budidaya Perikanan; 2) Pengembangan Perikanan Tangkap dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan 3) Peningkatan Usaha Perikanan dengan capaian sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Indikator Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016**

Program Prioritas	Indikator Kinerja	Realisasi 2015	Tahun 2016		Capaian (%)	Peningkatan (%)
			Target	Realisasi		
Pengembangan Budidaya Perikanan	Produksi Ikan Budidaya (ton)	44.536,00	48.989,00	57.534,38	117,34	29,19
Pengembangan Perikanan Tangkap dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Produksi Perikanan Tangkap (ton)	1.643,90	1.347,38	1.630,90	121,04	(0,79)
	- Perairan Umum	460,00	465,00	465,50	100,11	0,11
	- Laut	1.183,90	882,38	1.165,40	132,07	(1,56)
	Cakupan Bina	3,00	5,00	5,00	100,00	66,67

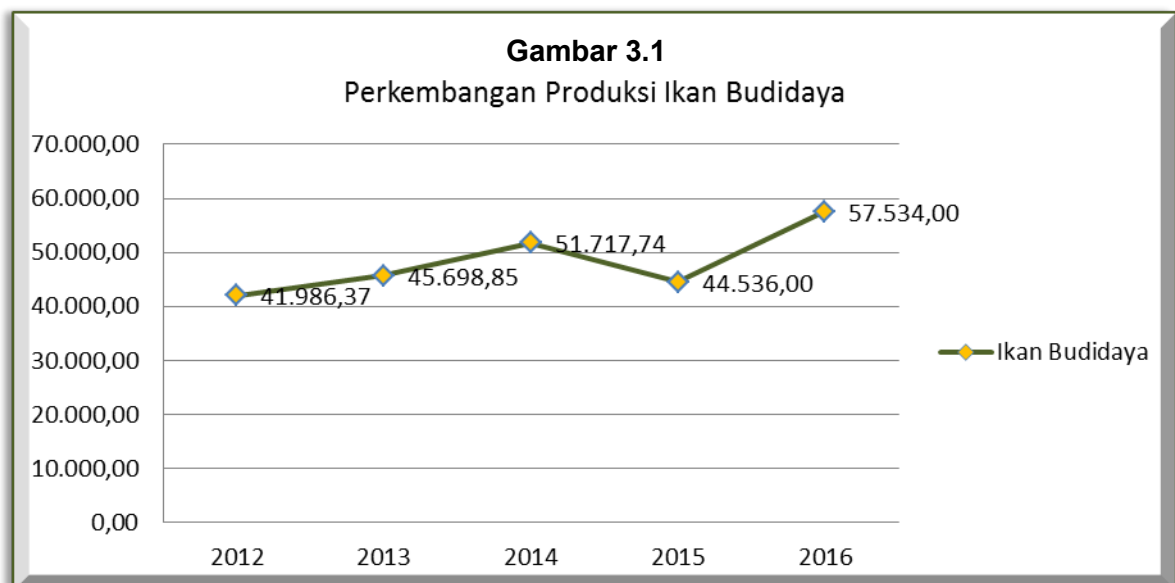


	Kelompok Nelayan					
Peningkatan Usaha Perikanan	Produksi Hasil Olahan Perikanan	108.560,00	113.988,00	114.225,00	100,21	5,22
	Jumlah Unit Usaha Pengolahan Hasil	123,00	149,00	152,00	102,01	23,58

Produksi ikan budidaya di Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun 2016 telah memenuhi target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2016. Pemenuhan target produksi ikan mencapai rata-rata 117,44% untuk produksi ikan budidaya dan 117,37% untuk produksi benih.

**Tabel 3.2**  
Realisasi Produksi Ikan Budidaya

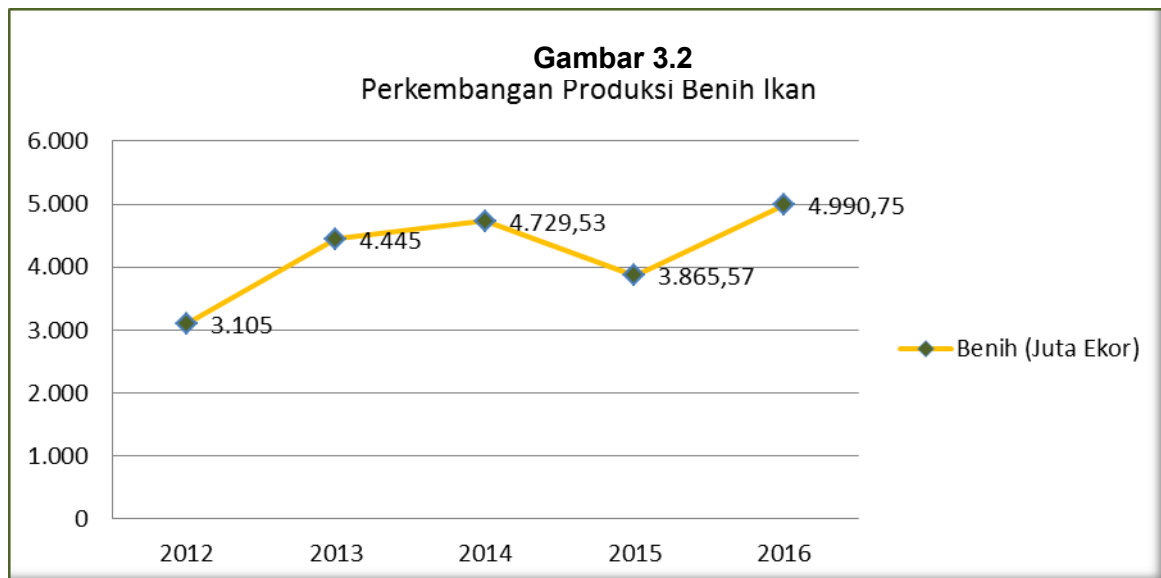
Indikator Kinerja	Realisasi 2015	2016		Pencapaian (%)	Peningkatan (%)
		Target	Realisasi		
Ikan Hasil Budidaya (ton)	44.536,00	48.989,00	57.534,00	117,44	29,19
Benih (juta ekor)	3.865,57	4.252,00	4.990,75	117,37	29,11



Produksi perikanan budidaya di Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun 2016 mengalami peningkatan 29,19% persen untuk produksi ikan hasil budidaya dan 29,11% untuk benih ikan dari tahun 2015. Peningkatan produksi perikanan budidaya didukung oleh kondisi musim hujan sepanjang tahun yang sangat



mendukung kegiatan budidaya perikanan. Kondisi tersebut berbeda dengan kondisi tahun 2015 dimana produksi perikanan budidaya mengalami penurunan cukup tajam dari tahun 2014. Penurunan tersebut disebabkan pada tahun 2015 terjadi kemarau panjang sehingga terjadi kekeringan pada kolam-kolam budidaya dan pembenihan.



Peningkatan produksi perikanan budidaya tersebut juga ditunjang oleh fasilitasi kegiatan dari Pemerintah Kabupaten melalui APBD Kabupaten dan APBD Propinsi selama tahun 2016. Kegiatan fasilitasi pemerintah dalam upaya meningkatkan produksi ikan budidaya antara lain melalui pemberian bantuan benih/induk, pakan dan peralatan budidaya ikan pada masyarakat, peningkatan sarana dan prasarana budidaya perikanan serta pembinaan dan peningkatan keterampilan pembudidaya, pengolah dan pemasar ikan melalui berbagai program dan kegiatan yaitu : 1) Pengembangan Sarana dan Prasarana Pembenihan Ikan Air Tawar; 2) Pengendalian Penyakit Ikan; 3) Pengembangan Agribisnis Perikanan; 4) Pengembangan Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan; 5) Pengembangan UPTD PBI; 6) Pengembangan Budidaya Udang Vanname dan Lobster di Kabupaten Tasikmalaya (Banprov 2016); 7) Pembinaan Kelompok Perikanan.

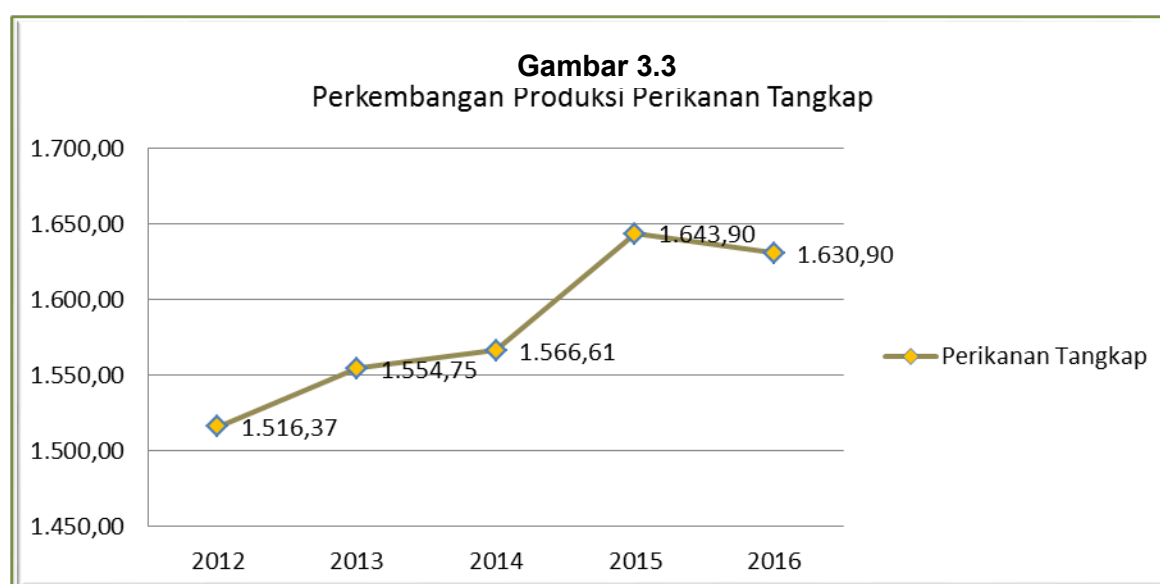
Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2016, target produksi perikanan tagkap tercapai 121,04%. Produksi ikan perairan umum tercapai 100,11% dan produksi ikan laut tercapai 132,07% sebagaimana ditunjukkan pada **Tabel 3.3**.



**Tabel 3.3**  
Realisasi Produksi Perikanan Tangkap

Indikator Kinerja (Ton)	Realisasi 2015	2016		Pencapaian (%)	Peningkatan (%)
		Target	Realisasi		
<b>Perikanan Tangkap</b>	<b>1.643,90</b>	<b>1.347,38</b>	<b>1.630,9</b>	<b>121,04</b>	<b>(0,79)</b>
Perairan Umum	460,00	465,00	465,50	100,11	0,11
Laut	1.183,90	882,38	1.165,40	132,07	(1,56)

Berdasarkan tabel di atas, meskipun tercapai namun produksi perikanan tangkap tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 0,79%. Penurunan tersebut diakibatkan oleh adanya penurunan produksi perikanan tangkap laut sebesar 1,56% akibat cuaca yang kurang mendukung terutama pada menjelang akhir tahun 2016 sehingga nelayan mengalami paceklik karena hasil tangkapan menurun. Sedangkan produksi perikanan tangkap di perairan umum daratan justru mengalami peningkatan sebesar 1,19%. Hal tersebut diakibatkan oleh kondisi musim hujan sepanjang tahun yang sangat mendukung berkembangnya ikan-ikan di perairan umum daratan.



Fasilitasi pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan produksi perikanan tangkap adalah melalui pembinaan nelayan tangkap, pemberian bantuan sarana prasarana penangkapan serta peningkatan sarana prasarana pangkalan pendaratan ikan melalui program/kegiatan antara lain : 1) Pembinaan Pengembangan Usaha Mina Perdesaan (PUMP); 2) Pengembangan Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan; 3) Peningkatan Kehidupan Nelayan; 4)



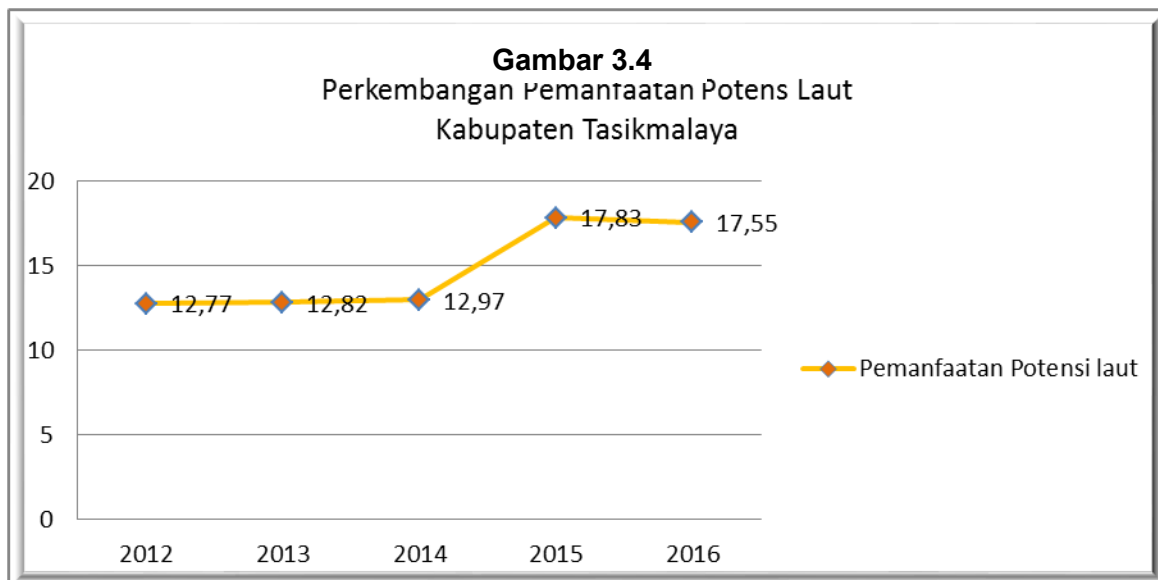
Pengembangan Sarana dan Prasarana PPI Pamayangsari Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya; 5) Pembangunan PPI Nusamanuk (Breakwater)

Pemanfaatan potensi laut tercapai 132,05% dari target yang ditetapkan 13,29%. Meskipun demikian, pemanfaatan potensi kelautan di Kabupaten Tasikmalaya khususnya hasil tangkapan ikan laut baru mencapai 17,55% dari potensi yang diperkirakan mencapai 6.640 ton/tahun.

**Tabel 3.4**  
**Realisasi Pemanfaatan Potensi Laut**

Indikator Kinerja	Realisasi 2015	2016		Pencapaian (%)	Peningkatan (%)
		Target	Realisasi		
Pemanfaatan Potensi Laut (%)	17,83	13,29	17,55	132,05	(-0,28)

Masih belum optimalnya pemanfaatan potensi laut, berkaitan erat dengan kondisi fasilitas PPI yang belum memadai sehingga belum dapat digunakan untuk mendaratnya kapal-kapal yang besar (lebih dari 5 GT). Selain itu, biaya operasional kapal berukuran besar (lebih 5 GT) yang relatif besar belum terjangkau nelayan, ditambah kemampuan nelayan untuk melaut lebih dari 2 mill masih belum terlatih sehingga kebanyakan nelayan hanya menangkap ikan pada wilayah 1-2 mil.



Program peningkatan usaha perikanan dilaksanakan dalam upaya untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk hasil perikanan petani



pengolah dan pemasar ikan. Perkembangan usaha hasil perikanan di Kabupaten Tasikmalaya, khususnya usaha pengolahan hasil dalam upaya meningkatkan nilai tambah produk, mengalami peningkatan baik dari sisi produksi maupun jumlah unit usaha yang berjalan.

Produksi hasil olahan ikan meningkat 5,22% dari tahun 2015 dengan total produksi mencapai 108.560,00 ton, dengan jumlah unit usaha mencapai 152 unit usaha pengolah hasil ikan yang terdiri dari usaha goreng ikan nilem baby fish, pindang ikan, abon ikan dan lain-lain.

Fasilitasi pemerintah daerah dalam upaya peningkatan usaha perikanan dilaksanakan melalui bimbingan, pembinaan, pelatihan, penyuluhan serta penyaluran bantuan sarana prasarana pengolahan hasil ikan yang diimplementasikan dalam beberapa program/kegiatan yaitu : 1) Pengembangan Unit Usaha Pengolahan Hasil Perikanan; dan 2) Pembinaan Kelompok Perikanan.

### **Prestasi dan Penghargaan yang Diperoleh**

Pada Tahun 2016 ada beberapa prestasi yang diraih di bidang perikanan. Prestasi tersebut diraih kelompok pembudidaya ikan baik tingkat provinsi maupun nasional yang telah mendapatkan fasilitasi baik melalui pembinaan maupun bantuan hibah barang dari pemerintah daerah. Kelompok tersebut antara lain:

**Tabel 3.5**  
**Prestasi Kelompok Perikanan 2016**

a. Lomba Kelompok Pelaku Utama Perikanan Tingkat Jawa-Barat

No.	Nama Kelompok	Komoditas	Alamat	Keterangan
1	UPR Bina Mekar	Ikan Nila	Ds. Ciawang Kec. Leuwisari	Juara II Kategori UPR Nila
2.	UPR Naratas	Ikan Lele	Ds Mandalagiri Kec. Leuwisari	Juara III Kategori UPR Lele



b. Lomba Kinerja Kelompok dan Kelembagaan Pokdakan Tingkat Jawa-Barat

No.	Nama Kelompok	Komoditas	Alamat	Keterangan
1	Kianom	Ikan Lele	Desa Sukaratu Kec Sukaresik Kab Tasikmalaya	Juara III Kategori POKDAKAN Lele-Patin
2.	Tanjung Hurip	Ikan Nila	Desa Ciawang Kec Leuwisari Kab Tasikmalaya	Juara II POKDAKAN Nila-Gurame

### 3.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Urusan Pangan

Dalam Undang-undang nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, ketahanan pangan didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan. Tiga pilar ketahanan pangan yang terdapat dalam definisi tersebut adalah ketersediaan (*availability*), keterjangkauan (*accessibility*) baik secara fisik maupun ekonomi, dan stabilitas (*stability*) yang harus tersedia dan terjangkau setiap saat dan setiap tempat. Apabila tiga pilar ketahanan pangan terpenuhi, maka masyarakat atau rumah tangga tersebut mampu memenuhi ketahanan pangannya masing-masing.

Tahun 2016 urusan pangan diselenggarakan oleh Bagian Ketahanan Pangan Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Bagian Ketahanan Pangan Setda Kabupaten Tasikmalaya dengan tugas pokok perumusan kebijakan teknis ketahanan pangan meliputi ketersediaan dan kewaspadaan pangan, distribusi dan pengendalian pangan serta ketahanan pangan masyarakat, berkoordinasi dengan teknis daerah dalam hal ini Dinas Pertanian Tanaman Pangan; Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan; Diskoperindag; Dinas Sosduknakertran; Dinas Kesehatan dan BULOG dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan.

Pelaksanaan program, kebijakan dan pencapaian sasaran dilaksanakan oleh Bagian Ketahanan Pangan berkoordinasi dengan lembaga teknis daerah dengan sasaran program meliputi Gabungan Kelompok Tani, Kelompok Tani, Kelompok Wanita Tani, dan kelompok masyarakat lainnya di wilayah Kabupaten Tasikmalaya



**Tabel 3.6**  
Target dan Realisasi Standar Pelayanan Minimal  
Bidang Ketahanan Pangan Kabupaten Tasikmalaya

No	Jenis Pelayanan/Indikator Kinerja	Target	Realisasi
<b>1</b>	Ketersediaan dan cadangan pangan		
	1) Ketersediaan energi dan Protein Perkapita - Energi Perkapita - Protein Perkapita	90	93,04
	2) Penguatan cadangan pangan	60	62,00
<b>2</b>	Distribusi dan akses pangan		
	1) Ketersediaan Informasi Pasokan harga dan akses pangan di daerah	90	76,15
	2) Stabilitas Harga dan pasokan pangan	90	100,00
<b>3</b>	Penganekaragaman dan keamanan pangan		
	1) Skor pola pangan harapan (PPH)	90	68,10
	2) Pengawasan & pembinaan keamanan pangan	80	60,00
<b>4</b>	Penanganan daerah rawan pangan	60	83,33

Kabupaten Tasikmalaya belum bisa mencapai target dikarenakan pada indikator ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan daerah capainnya menurun dari tahun 2015 sebesar 77,26% menjadi 76,15%. Hal tersebut dikarenakan adanya penurunan harga yang signifikan dari tahun 2015 sampai 2016. Kurangnya keanekaragaman konsumsi pangan yang ditunjukkan dengan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 68,10% yang masih rendah dari rata-rata PPH Jawa Barat sebesar 78,3%. Tahun 2016 skor PPH belum mencapai target dikarenakan masih kurangnya kesadaran masyarakat akan konsumsi non beras non terigu, masyarakat umumnya masih ketergantungan terhadap beras meskipun upaya peningkatannya sudah diupayakan melalui sosialisasi maupun kegiatan lain untuk penganekaragaman konsumsi pangan dengan pemanfaatan lahan pekarangan.

Pada indikator pengawasan dan pembinaan keamanan pangan belum mencapai target yang sudah dikarenakan masih kurangnya sumber daya manusia dalam kegiatan peningkatan mutu dan keamanan pangan juga belum tersedianya data terbaru pada lahan yang sudah bersertifikasi pada pangan segar. Pada indikator penanganan daerah rawan pangan Kabupaten Tasikmalaya sudah bisa mengatasi daerah-daerah rawan pangan dengan cara memberi bantuan berupa sembako.





### 3.3. Isu Strategis Pembangunan Ketahanan Pangan dan Perikanan

Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, isu strategis adalah kondisi/hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya signifikan bagi daerah. Kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan dimasa yang akan datang.

Sebelum menentukan isu strategis, perlu identifikasi permasalahan-permasalahan terkait melalui pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya. Tujuan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah adalah untuk mewujudkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah dan kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil evaluasi pembangunan tahun 2017, ditetapkan isu strategis Urusan Pangan dan Urusan Kelautan dan Perikanan sebagai berikut :

#### a. Urusan Pangan

- 1) Harga pangan pokok strategis yang belum stabil terutama dalam masa paceklik dan panen raya;
- 2) Rendahnya tingkat kemandirian pangan di desa kategori miskin dan masih banyaknya penduduk yang rawan pangan berdasarkan data dari Badan Ketahanan Pangan Daerah (BKPD) Provinsi Jawa Barat, terdapat 31 Desa Rawan Pangan di Kabupaten Tasikmalaya;
- 3) Masih terbatasnya fasilitas lumbung pangan perdesaan;
- 4) Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, aman dan halal;
- 5) Kurangnya keragaman pangan terlihat dari indikator Pola Pangan Harapan (PPH) 61,5% dari nilai ideal 100%;
- 6) Kurang maksimalnya kelembagaan ketahanan pangan karena keterbatasan kewenangann tugas pokok dan fungsi;
- 7) Rendahnya cadangan pangan pemerintah daerah.



b. Urusan Kelautan dan Perikanan

- 1) Kurangnya armada penangkapan, alat tangkap serta alat bantu penangkapan;
- 2) Rendahnya produktivitas hasil tangkap;
- 3) Belum selesainya penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap (Pangkalan Pendaratan Ikan/PPI);
- 4) Degradasi kualitas lingkungan pesisir yang mengakibatkan jumlah ikan di sekitar pesisir menurun drastis;
- 5) Terbatasnya kewenangan pengelolaan pesisir yang bukan lagi kewenangan pemerintah kabupaten akibat berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 6) Rendahnya kesadaran nelayan akan keselamatan pada saat melaut;
- 7) Kurangnya diversifikasi usaha nelayan selain penangkapan ikan;
- 8) Berkurangnya kualitas, kuantitas, dan debit air di sentra perikanan air tawar;
- 9) Masih rendahnya produktivitas perikanan budidaya air tawar, payau dan laut;
- 10) Rendahnya kualitas induk ikan yang digunakan masyarakat pembenih ikan;
- 11) Masih kurangnya sarana dan prasarana pembenihan ikan.



## BAB IV

### RENCANA KINERJA 2017

#### 4.1. Rencana Kinerja Tahun 2017

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya menetapkan target kinerja target kinerja sebagai berikut :

**Tabel 4.1**  
Target Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan  
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Produksi dan Daya Saing Produksi Usaha Perikanan Budidaya	a. Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	10 %
		b. Peningkatan Produksi Hasil Olahan Perikanan Budidaya	2 %
2.	Meningkatnya Produksi dan Daya Saing Produksi Usaha Perikanan Tangkap	a. Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	1,2 %
		b. Peningkatan Produksi Hasil Olahan Perikanan Tangkap	1 %
3.	Meningkatnya Ketersediaan dan Distribusi Pangan	a. Peningkatan Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita	1 %
		b. Peningkatan Penguatan Cadangan Pangan	5 %
		c. Peningkatan Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah	5 %
		d. Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan	100 %
		e. Peningkatan Penanganan Daerah Rawan Pangan	5 %
4.	Meningkatnya Keragaman dan Keamanan Pangan	a. Peningkatan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	1 %
		b. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	80 %



#### 4.2. Rencana Kerja dalam Rangka Pencapaian Target Sasaran

Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya tahun 2017 dalam rangka pencapaian sasaran strategisnya melaksanakan program kerja sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
Program Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan  
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program
1	Meningkatnya produksi dan daya saing produksi usaha perikanan budidaya	- Meningkatkan produksi perikanan budidaya	10%	- Pengembangan Budidaya Perikanan - Peningkatan Usaha Perikanan
		- Meningkatkan produksi hasil olahan perikanan budidaya	2%	
2	Meningkatnya produksi dan daya saing produksi usaha perikanan Tangkap	- Meningkatkan produksi perikanan tangkap	1,2%	- Pengembangan Perikanan Tangkap dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir - Peningkatan Usaha Perikanan
		- Meningkatkan produksi hasil olahan perikanan tangkap	1%	
3	Meningkatnya ketersediaan dan distribusi pangan	- Peningkatan Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita	1%	- Peningkatan Ketahanan pangan
		- Peningkatan Penguatan Cadangan Pangan	5%	
		- Peningkatan Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah	5%	
		- Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan	100%	
		- Peningkatan Penanganan Daerah Rawan Pangan	5%	
4	Meningkatnya keragaman dan keamanan pangan	- Peningkatan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	1%	- Peningkatan Ketahanan pangan
		- Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	80%	



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program
5	Meningkatnya kinerja dinas	- Terpenuhinya kebutuhan rumah tangga dinas	100%	- Pelayanan Administrasi Perkantoran
		- Terpenuhinya urusan kepegawaian dinas	100%	- Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
		- Terpenuhinya dokumen perencanaan dinas	100%	- Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
		- Terpenuhinya dokumen evaluasi dan pelaporan kinerja dinas	100%	- Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
		- Terpenuhinya dokumen pelaporan keuangan dinas	100%	
		- Terpenuhinya dokumen pelaporan aset dinas	100%	

Rencana program dan kegiatan tahun 2017 yang telah disinkronkan dengan usulan daerah melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat desa sampai kabupaten, dengan usulan pendanaan program dan kegiatan tersebut bersumber dari APBD kabupaten, APBD provinsi dan APBN, berdasarkan hasil kesepakatan dan verifikasi dengan pendekatan secara partisipatif, teknokratif, up down dan button up sebagai upaya untuk mencapai sasaran program/kegiatan sebagaimana tertuang dalam rencana strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya serta merupakan tahap pertama dari RPJMD ke-dua tahun 2016-2017.

Adapun rencana program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya tahun 2017 sesuai dengan bidang dan urusan berdasarkan hasil evaluasi program dan kegiatan tahun sebelumnya dan mengacu pada dokumen Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya 2016-2021 serta dokumen RPJMD 2016-2021 Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana tersaji dalam matri tabel 4.3 berikut ini:















## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017 memiliki kedudukan yang cukup strategis yang dapat menjembatani dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya yang memuat rencana pembangunan pangan dan perikanan.

Rencana Kerja Tahunan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017 merupakan dokumen yang akan diimpelentasikan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD tahun 2017. Rencana Kerja Tahunan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017 memberikan arahan dan target yang harus dicapai SKPD dalam tahun berjalan.

Demikian Rencana Kinerja Tahunan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017 ini kami susun, semoga bermanfaat dan memberikan gambaran secara umum rencana pelaksanaan kegiatan pada tahun 2017.

Tasikmalaya, Januari 2017

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan  
Perikanan Kabupaten Tasikmalaya

H. I. Sutiaman, S.Sos. MM. M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19590408 198503 1 016

